Konstruksi Makna Larangan Wisata Pantai Selatan Bagi Santri PPRU 1 (Analisis Etnografi)

Abid Masluhir Rifqi ^{1*}, Kholik ²

¹⁻² Universitas Al-Qolam Malang, Indonesia

Email: abidmasluhirrifqi22@alqolam.ac.id^{1*}, kholik@alqolam.ac.id²

Alamat: Jl. Sumbergesing Wetan, Gedangan, Kec. Gedangan

Korespondensi penulis: abidmasluhirrifqi22@alqolam.ac.id

Abstract. *This study analyzes the impact of the ban on visiting the south coast on students of Raudlatul Ulum 1 Islamic Boarding School (PPRU 1) through a qualitative method with an ethnographic approach. This study investigates the cultural, religious, and social reasons that underlie the ban through active participant observation and interviews. The results of the study indicate that the ban for PPRU 1 students to instill obedience to existing rules and the beauty of the South Coast has more than one meaning and is a multifaceted phenomenon. The ban is not only influenced by mystical beliefs about supernatural powers that exist on the South Coast, but is also deeply internalized with religious values, discipline, and the identity of the students. This ban ensures action as a mechanism of social control of the order and sanctity of the pesantren environment. In addition, this ban creates social boundaries between students and members of society and increases social cohesion among students. The study also reveals that this ban is not a rigid and absolute rule. There are gray nuances in its application, depending on the status of a person's santri and the purpose of the visit to the South Coast. This study contributes by showing the complexity of cultural phenomena in the pesantren environment. The research findings can be included as considerations in the planning and implementation of educational programs in Islamic boarding schools, as well as in efforts to maintain cultural and religious values behind the ban.*

Keywords: South Coast, Santri, PPRU1, Ethnographic Analysis

Abstrak. Penelitian ini menganalisis dampak larangan mengunjungi pantai selatan terhadap santri Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 (PPRU 1) melalui metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini menyelidiki alasan budaya, agama, dan sosial yang menjadi dasar larangan tersebut melalui pengamatan partisipasi aktif dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan bagi santri PPRU 1 untuk menanamkan kepatuhan terhadap aturan yang ada dan keindahan Pantai Selatan memiliki lebih dari satu makna dan merupakan fenomena multifaset. Larangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kepercayaan mistis tentang kekuatan supranatural yang ada di Pantai Selatan, tetapi juga sangat terinternalisasi dengan nilai-nilai agama, disiplin, dan identitas santri. Larangan ini memastikan tindakan sebagai mekanisme kontrol sosial keteraturan dan kesucian lingkungan pesantren. Selain itu, larangan ini menciptakan batas sosial antara santri dan anggota masyarakat serta meningkatkan kohesi sosial di antara santri. Penelitian juga mengungkapkan bahwa larangan ini bukanlah aturan yang kaku dan mutlak. Terdapat nuansa keabu-abuan dalam penerapannya, tergantung pada status kesantrian seseorang dan tujuan dari kunjungan ke Pantai Selatan. Studi ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan kompleksitas fenomena budaya dalam lingkungan pesantren. Temuan penelitian dapat dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan di pesantren, serta dalam upaya mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama di balik larangan tersebut.

Kata Kunci: Pantai Selatan, Santri, PPRU1, Analisis Etnografi

1. LATAR BELAKANG

Folklor atau disebut dengan istilah sastra lisan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Cerita rakyat, legenda, dan mitos telah diturunkan melalui tradisi lisan dari generasi ke generasi dan memainkan peran penting dalam pembentukan norma, nilai, dan kepercayaan masyarakat setempat. Folklor juga dapat digunakan sebagai media pendidikan serta dapat digunakan sebagai salah satu pusat pendidikan anak yang tersirat pada tulisan ini. Sebagai media paksaan dan pengawasan

dalam segi sosial agar aturan-aturan atau norma-norma masyarakat nantinya dipatuhi. Banyak sastra lisan yang mengantongi "mitos" yang dapat mengontrol manusia untuk melakukan sesuatu atau untuk melarang melakukan sesuatu (Endraswara, 2013). Larangan-larangan yang berkaitan dengan lokasi tertentu, seperti gunung, hutan, dan pantai, adalah salah satu sastra lisan atau tradisi cerita yang masih hidup di Negara ini.

Pantai Selatan Jawa, juga dimafhumi sebagai salah satu destinasi yang menyimpan banyak cerita rakyat tentang hal-hal atau larangan yang tidak boleh dilakukan dan dilanggar ketika berada di sana. Larangan ini biasanya ditujukan kepada kelompok tertentu seperti anak-anak, perempuan, dan wanita hamil. Selain itu juga dikenal sebagai istilah Pansel yang memiliki pesona alam yang memikat dan banyak cerita rakyat yang menarik. Salah satu cerita rakyat atau mitos yang paling terkenal dan pembicaraan yang masih bersifat abu-abu di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 (PPRU 1) adalah larangan untuk santri mengunjungi Pansel. Larangan ini telah menjadi bagian dari tradisi dan budaya pesantren selama bertahun-tahun, dan para santri masih mematuhi hingga hari ini.

Peneliti menggunakan jenis pendekatan etnografi dengan tujuan untuk dapat menganalisis makna larangan wisata Pansel bagi santri PPRU 1. Penelitian dengan pendekatan etnografi merupakan bagian dari jenis desain penelitian kualitatif (Darmanita & Yusri, 2020). Dengan menggunakan metode dan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang luas dan memadai tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan agama terkandung dalam larangan wisata Pantai Selatan. Hasil penelitian diharapkan akan menambah pemahaman peneliti tentang nilai-nilai budaya dan agama yang mempengaruhi larangan ini yang telah menjadi tanda tanya di kalangan santri, alumni, dan bahkan wali santri yang memiliki notebel bukan alumni pondok tersebut. Maka dalam penelitian ini peneliti untuk dapat memahami budaya, larangan dan aturan (undang-undang pesantren) baik tertulis atau tidak tertulis.

Larangan wisata Pantai Selatan (Pansel) bagi santri Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 (PPRU 1) merupakan sebuah fenomena budaya yang menarik untuk ditelaah. Larangan ini telah menjadi bagian dari tradisi pesantren selama bertahun-tahun, dan masih dipatuhi oleh para santri hingga saat ini. Oleh sebab itu maka perlu memahami makna larangan wisata Pansel bagi santri PPRU 1 yang penting dilakukan karena beberapa alasan:

- Nilai Religi: Larangan wisata Pansel ini memiliki nilai keriligian bagi segenap santri antara mematuhi atau tidak, meski nantinya ada dampak atau tidak. Hal ini merupakan wujud dari ketawau'an santri terhadap peraturan pondok atau *dawuh* (perkataan) para masyayikh.

- Nilai Budaya: Larangan wisata Pansel ini dapat mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi yang dipatuhi oleh santri PPRU 1. Memahami makna larangan ini dapat membantu segenap elemen pesantren terutama santri aktif PPRU 1 dalam memahami nilai-nilai tersebut.
- Konstruksi Sosial: Larangan wisata Pansel bukanlah aturan semata yang harus dipatuhi bersama adalah bagian dari konstruksi sosial komunitas pesantren. Dengan memahami makna larangan tersebut, maka segenap elemen pesantren terutama santri aktif PPRU 1 dapat membantu dalam memahami bagaimana konstruksi sosial tersebut dibentuk dan dipelihara.
- Pengaruh Terhadap Kehidupan Santri: Larangan wisata Pansel memiliki dampak tertentu terhadap kehidupan santri aktif PPRU 1 tersendiri. Dalam makna larangan ini dapat membantu kita memahami dampak, baik positif maupun negatifnya.
- Dialog Antar Budaya: Memahaminya dari makna larangan wisata Pansel membantu meningkatkan diskusi dan toleransi antar budaya.

Memahami makna larangan wisata Pansel bagi santri PPRU 1 adalah topik penelitian yang perlu diteliti dan menarik, dikarenakan belum ada peneliti yang meneliti terhadap larangan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dengan tujuan peneliti agar mengetahui bagaimana para santri melihat dan mematuhi larangan ini. Hal tersebut dikarenakan Fokus studi etnografi biasanya pada pola kegiatan, bahasa kepercayaan, ritual, dan gaya hidup (Darmanita & Yusri, 2020). Ini menjadi pembeda dari penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan ini yang hanya melihat dan menelusuri dari segi sejarah dan asal-usul larangan dari luar.

Penelitian "KONSTRUKSI MAKNA LARANGAN WISATA PANTAI SELATAN BAGI SANTRI PPRU 1 (ANALISIS ETNOGRAFI)" memiliki keurgensian sangat tinggi. Hal ini dikarenakan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis secara signifikan. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk memahami makna larangan wisata Pantai Selatan bagi santri aktif PPRU 1, dan juga dapat melihat bagaimana larangan ini dikonstruksi dan direproduksi dalam konteks budaya pesantren.

Penelitian ini dilakukan agar dapat menjawab anggapan-anggapan atau persepektif terhadap larangan tersebut yang masif bersifat ambigu. Anggapan atau persepsi tersebut tidak lain bersumber dari kata-kata atau cerita para santri senior (ujar salah satu santri PPRU 1). Oleh sebab itu, peneliti melakukan hal ini dilatar belakangi keamiguan erhadap larangan tersebut serta dampak atau hal yang akan terjadi jika larangan tersebut dilakukan. Meski

nantinya hal tersebut dilakukan seperti *tholabul halal* (mencari nafkah/uang) yang berlokasi di daerah pantai selatan atau dengan anggapan yang lain.

Dalam penelitian terdahulu, Kasdu Erwanto, Ahadi Sulissusiawan, dan Endang Susilowati dengan judul penelitian "Pantang Larang Dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Menggunakan Kajian Sociolinguistik", yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi mengemukakan hasil dari analisisnya menunjukkan bahwa berdasarkan faktor-faktor berikut: Genre kelamin, usia, keselamatan jiwa, benda atau alat, lokasi, waktu, dan saat melakukannya, pantang larang ini disarankan dalam masyarakat Melayu Kecamatan Bunut Hilir.

Studi sebelumnya, "Kearifan Lokal dan Mitigasi Bencana Masyarakat Pantai Selatan Kabupaten Cilacap", ditulis oleh Aprillia Findayani, Nanda Julian Utama, dan Khoirul Anwar, menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut penelitian, orang Cilacap memiliki kepercayaan dan adat istiadat yang kuat, yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini juga dapat dilacak dari waktu ke waktu. Kearifan lokal masyarakat Cilacap adalah bagian dari mitigasi. Bencana gempa bumi dan tsunami tercermin dalam (1) keyakinan akan adanya Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan di mana sebuah gelombang besar pernah terjadi. Masyarakat belajar bagaimana mempersiapkan diri menghadapi tsunami. 2) tradisi sedekah laut, di mana orang melakukan ritual melarung sesaji ke laut sebagai cara untuk berterima kasih atas hasil laut yang baik dan mendoakan keselamatan. (3) Gunung Selok, yang dianggap memiliki berkah bagi mereka yang percayainya, dianggap sebagai bukti pelestarian ekosistem dan melindungi daratan dari tsunami (Findayani et al., 2020).

Penelitian terdahulu ketiga yang ditulis oleh ST. Zakiah Darmani dan M. Yusri berjudul "Pengoperasian Penelitian Naratif dan Etnografi; Pengertian, Prinsip-Prinsip, Prosedur, Analisis, Interpretasi, dan Pelaporan Hasil" ini menunjukkan bahwa penelitian naratif dan etnografi adalah jenis penelitian yang hanya berfokus pada validitas data penelitian kualitatif yang berasal dari kata-kata yang bersumber dengan menggunakan metode studi pustaka.

Dari ketiga penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa setiap penelitian terdahulu sangat berkontribusi terhadap penelitian ini. Salah satunya dapat meningkatkan pemahaman kita tentang konsep pantang larang dalam budaya Melayu, yang mencakup elemen dasar seperti keselamatan jiwa, jenis kelamin, usia, objek atau alat, lokasi, waktu, dan saat melakukannya. Konsep ini dapat digunakan untuk menganalisis dampak larangan wisata Pantai Selatan bagi santri PPRU 1, terutama dengan mempertimbangkan faktor-

faktor ini. Kedua, dapat memberikan contoh penerapan pendekatan etnografi dalam penelitian budaya. Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis makna larangan wisata Pantai Selatan bagi santri PPRU 1 secara mendalam dan kontekstual. Dan manfaat ketiga adalah peningkatan pengetahuan tentang metodologi penelitian kualitatif, terutama penelitian naratif dan etnografi yang berpusat pada informasi kualitatif seperti kisah dan kata-kata. Sehingga untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengumpulkan data dan menganalisis data dari berbagai perspektif dan pengalaman santri tentang larangan wisata Pantai Selatan bagi PPRU 1.

Hasil dari penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu hal baru yang dapat memberikan kontribusi untuk memahami makna larangan wisata Pantai Selatan bagi santri PPRU 1, serta untuk melihat bagaimana larangan ini dikonstruksi dan direproduksi dalam konteks budaya pesantren. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai agama dan budaya lokal dapat memengaruhi cara masyarakat bertindak dan melihat larangan tersebut untuk digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait dalam pertimbangan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan terkait dengan larangan wisata Pantai Selatan bagi santri PPRU 1.

2. KAJIAN TEORITIS

Konstruksi Sosial Realitas (*Social Construction of Reality*)

Menurut teori yang dipopulerkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas sosial dibentuk oleh interaksi sosial dan konsensus bersama daripada menjadi sesuatu yang objektif dan alami (Rifa'i, 2024). Dalam penelitian ini, larangan wisata Pantai Selatan dianggap sebagai konstruksi sosial yang dibuat, dipertahankan, dan diinternalisasi oleh komunitas pesantren daripada sebagai fakta alam. Teori ini akan membantu menganalisis bagaimana larangan dibangun secara kolektif, bagaimana makna dilekatkan padanya (misalnya, terkait dengan mitos Nyi Roro Kidul, bahaya, moralitas, atau kedisiplinan), dan bagaimana santri menginternalisasi atau bahkan berdebat tentang makna tersebut.

Simbolisme dan Makna (*Symbolism and Meaning*)

Larangan adalah sebuah istilah yang memiliki arti khusus. Studi ini akan menyelidiki konsep-konsep simbolisme, termasuk perspektif Clifford Geertz menggambarkan kebudayaan sebagai sekumpulan mekanisme kontrol yang didasarkan pada gagasan bahwa pemikiran manusia bersifat sosial dan publik, serta kebudayaan berisi rencana, aturan, resep, dan petunjuk untuk mengatur perilaku manusia (Husna et al., 2024). Larangan Pantai Selatan dapat menjadi simbol yang kompleks, menunjukkan prinsip moral, batasan

sosial, kelompok pesantren, dan cara melihat bahaya atau hal gaib. Mempelajari makna simbolik ini akan membantu Anda memahami mengapa larangan-larangan ini penting bagi para santri.

Antropologi Agama/Sosiologi Agama (*Anthropology of Religion / Sociology of Religion*)

Teori antropologi atau sosiologi agama menjadi sangat relevan karena konteksnya adalah pondok pesantren. Konsep seperti sacred dan profane (Émile Durkheim) dapat digunakan untuk memahami bagaimana ruang di Pantai Selatan mungkin dianggap dari perspektif pesantren sebagai 'profane' atau bahkan 'berbahaya'. Selain itu, teori tentang ritual, mitos, dan sistem kepercayaan akan membantu menganalisis bagaimana mitos lokal (seperti Nyi Roro Kidul) atau cerita keagamaan (tentang menjaga diri dari fitnah dan maksiat) saling terkait dan membentuk cerita yang menguatkan larangan. Karena menurut Durkheim semua keyakinan agama memisahkan antara yang sakral (suci, berkuasa, dihormati) dan yang profan (biasa, tidak bermakna) (Isnawi & Yulianty, 2024). Kedua konsep ini saling melengkapi dan membentuk struktur simbolik agama, menunjukkan perbedaan tingkat keberadaan suatu objek. Selain itu, perhatian tertuju pada peran kyai atau nyai, sebagai otoritas keagamaan, dalam menciptakan norma dan aturan sosial di lingkungan pesantren.

Kontrol Sosial dan Norma (*Social Control and Norms*)

Salah satu bentuk kontrol sosial adalah larangan dengan tujuan untuk melihat bagaimana pesantren menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap santrinya dapat mengaplikasikan teori kontrol sosial, seperti yang ditemukan oleh Travis Hirschi atau Émile Durkheim tentang anomie, dapat digunakan. istilah anomie sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai dalam sebuah komunitas masyarakat. Anomie dalam teori Durkheim juga dipandang sebagai kondisi yang mendorong sifat individualistis (memenangkan diri sendiri, egois) sehingga cenderung melepaskan diri dari kontrol sosial (Sudianto, Maleh, 2025). Larangan ini berfungsi sebagai standar perilaku, menjaga keteraturan, dan mencegah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas pesantren. Analisis ini dapat mencakup bagaimana norma-norma ini dikomunikasikan, ditegakkan, dan sanksi apa yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti memilih dan mengaplikasikan jenis metode penelitian kualitatif agar fokus pada pemahaman yang

mendalam tentang fenomena atau gejala alami. Dengan melibatkan diri secara langsung dalam konteks penelitian ini, peneliti berusaha untuk menemukan makna di balik fenomena tersebut. Langkah selanjutnya, maka bagi peneliti dapat mengumpulkan beberapa data yang sangat kaya dan kompleks yang tidak dapat diperoleh melalui pendekatan penelitian kuantitatif sebelumnya. Penelitian kualitatif dapat dikatakan karena sangat mendasar dan naturalistik atau dikatakan karena sangat alami dan tidak dapat dilakukan di laboratorium atau di tempat lain (Sugiyono, 2010).

Teori Konstruksi Sosial, yang diciptakan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann, adalah salah satu pendekatan terpenting untuk memahami bagaimana realitas sosial dibentuk. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan etnografi sebagai metode penelitian kualitatif (Palar et al., 1966). Dengan menggunakan teori tersebut, peneliti dapat memahami bagaimana makna larangan itu dikonstruksikan, dapat menganalisis peran interaksi sosial baik mencakup santri dan *keluarga dhalem* (pengasuh), dan mengeksplorasi perubahan makna larangan tersebut berubah seiring dengan waktu dan pengaruh dari luar.

Data primer penelitian ini berasal dari observasi dan wawancara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal, artikel, dan sumber lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahap. *Pertama*, inventaris literatur ilmiah, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan sastra lisan dan kearifan lokal yang berhubungan dengan pantai Selatand. Hal ini bertujuan agar dapat sesuai dengan tujuan dari peneliti. *Kedua*, langkah selanjutnya adalah pengumpulan informasi melalui wawancara secara mendalam bersama beberapa Dewan Pengasuh dan alumni sepuh. Selanjutnya, data wawancara ditranskrip secara lengkap dan akurat. Kemudian data dari wawancara dan observasi dikodekan berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti: Makna larangan wisata pantai selatan, sumber-sumber pengetahuan tentang larangan, pengaruh larangan terhadap perilaku santri, perbandingan antara pemahaman santri dengan literatur agama. Setelah menentukan atau mengelompokkan data sesuai dengan tema, peneliti membuat beberapa kategori yang muncul dari proses coding yang kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema yang lebih besar. Data hasil temuan penelitian diuraikan dan diperjelas dalam bentuk ringkasan dan interpretasi. Penyusunan deskripsi dan analisis hasil penelitian adalah langkah dari tahap terakhir dari penelitian ini. Kemudian dari hasil dari observasi lapangan ini akan didokumentasikan dan dipresentasikan untuk menunjukkan apakah larangan pergi ke pantai selatan ini dapat diintegrasikan dan dipatuhi sebagai salah satu sebuah larangan dan peraturan yang tidak tertulis. Sebagai contoh, peneliti dapat melihat bagaimana santri secara individual menanggapi larangan wisata Pansel dengan mengunjungi tempat-tempat wisata

terlarang di daerah tersebut. Maka dengan artian hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman kita tentang beberapa faktor yang memengaruhi perilaku santri dalam melanggar larangan tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pantai Selatan

Pantai Selatan yang berlokasi di Kabupaten Malang daerah Selatan ini, juga disebut Pantai Laut Selatan atau Pantai Laut Kidul, adalah kumpulan pantai di pesisir selatan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pantai-pantai ini terkenal karena keindahan alamnya yang memukau, ombaknya yang besar, dan berbagai legenda dan mitos yang membuat mereka terkejut.

Gambar 1. peta JLS Balekambang Sendangbiru (googlemap)

Sumber: <https://www.kompasiana.com/iwannugroho/578c1697c3afbd290e5b7b25/indahnyajalur->

Dari gambar peta diatas, dapat digambarkan betapa luasnya wilayah lokasi Pantai Selatan yang ada di Kabupaten Malang bagian Selatan. Yang menjadi tanda tanya atau pertanyaan dalam bnak santr adalah apakah larangan tersebut hanya tertuju panda pantai-pantai tertentu atau seluruh Pantai Selatan. Pertanyaan terebut timbul dikarenakan sampai saat ini terdapat wista Pantai yang baru dibuka, sepewrti Pantai Penyu. Seiring dengan usia dunia bertambah, jarak antara awal tahun yang ditetapkannya larangan untuk berwisata kepantai Selatan semakin banyak pula dibukaknya Pantai-pantai baru.

Larangan wisata Pantai Selatan bagi santri PPRU 1 ini tidak hanya didasarkan pada sebuah kepercayaan dan moralitas belaka, tetapi juga memiliki unsur dimensi sosiokultural yang sangat mendalam. Larangan ini berfungsi juga sebagai alat kontrol sosial untuk tetap menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan pesantren. Dengan mematuhi larangan tersebut, seorang santri menunjukkan komitmen mereka terhadap aturan pesantren dan memperkuat rasa persaudaraan mereka sebagai komunitas santri. Hal itu juga dapat dijadikan sebagi salah satu identitas santri PPRU 1 juga diperkuat oleh larangan wisata

Pantai Selatan, yang membedakannya dari masyarakat awam. Dengan mengikuti peraturan ini, santri dapat menunjukkan komitmennya terhadap prinsip dan kebiasaan pesantren terutama terhadap peraturan atau larangan dari pondok pesantren baik yang tertulis atau tidak. Hal ini menciptakan batas sosial antara para santri PPRU 1 dan masyarakat umum.

Larangan pantai yang dimaksud adalah pantai selatan secara umum, buan tertentu. Mesi pada data dari hasil wawancara mengatakan tertentu. Pengglobalan pantai selatan ini dengan tujuan agar tetap menjaga atau tidak serta merta melakukannya. Meski. Jika berpatk pada pantai tertentu dan jika melakukannya ada dampak, maka hal inilah yang ditakutkan.

Santri

Kata santri dalam KBBI mempunyai makna orang yang mendalami agama Islam (bidin A, 2017). John E. mengemukakan bahwa kata "santri" berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, dan kata "santri" juga berasal dari kata "cantrik", yang berarti seseorang yang selalu mengikuti guru ke mana pun dia pergi (Huda & Yani, 2015). Berbagai persepektif berpendapat bahwa istilah "santri" lebih dekat dengan istilah "cantrik", yang berarti seseorang yang belajar, mendalami agama (islam), dan setia (taat) kepada gurunya ke mana pun mereka pergi dan menetap. Tidak mungkin membangun pondok atau asrama tempat santri tinggal, sehingga disebut "pondok pesantren" jika tidak ada santri yang ingin tinggal di sana dan mengikuti guru mereka (Kadir, 2012). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa santri adalah tetapi jugang tidak hanya terdaftar di institusi pendidikan islam, tetapi juga seorang santri yang dengan sungguh-sungguh mempelajari ilmu ilmu dan pengetahuan tentang agama islam.

Menjadi seorang santri bukan sekedar mendapatkan pendidikan agama, namun juga merupakan komitmen untuk men-*taqorrub*-kan diri kepada Allah SWT. Di balik kesederhanaan dan disiplin kehidupan pesantren, tertanam nilai-nilai luhur yang mengantarkan santri menuju jalan ridho-Nya. Ketaatan santri terhadap peraturan pesantren adalah gambaran ketaatan mereka terhadap Allah SWT. Peraturan yang dibuat oleh dewan pengasuh dan pengurus dibuat untuk membantu santri mencapai tujuan pendidikan pesantren dan menjalani kehidupan sesuai syariat Islam dan membentuk karakter kedisiplinan pada dirinya.

Ditinjau secara umum, santri dibagi menjadi dua katagori: santri aktif dan nonaktif (Rifqi Fauzi, Mia Nurislamiah, 2023). Seorang santri dikatakan aktif jika belum *sowan* dalam rangka berpamit kepada dewan pengasuh atas keberhentiannya menimba ilmu di pesantren tersebut. Tetapi sebaliknya santri dikatakan sebagai sebagai santri non aktif jika

sudah berpamit. Dalam konteks larangan berwisata kepantai selatan ini adalah bagi santri yang masih dikatan aktif, bukan santri yang bersetatus non aktif.

Status keaktifan santri PPRU 1 ini dapat menjadi pengikat terhadap laangan ini baginya untuk menentang atau melanggar larangan ini. Meki terdapat anggapan opini beberapa santri “*lek budal teko omah e ndak opo-opo, soale wujud e y ganok opo-opo selama iki*”. Dengan anggapan tersebut, salah satu narasumber mengatakan “*ya selamat*”. Nara sumber juga menyebutkan dalam hal laranga ini terkait status keantriannya, apakah dia bersetatus legal/aktif tidaknya status itu. Kemudian larangan ini dikaitan dengan qoidah dalam ilmu *ushul fiqih* yaitu *Syaddud Daro 'i* (menghindari hal yang dilarang) dan juga terdapat kaitannya dengan qoidah dalam ilmu *ushul fiqih* yang berbunyi “*muqoddamun alal imtisalil awamil (menghindari ssuatu itu lebih diutamakan dari pada melakukannya)*”. Latar dari dipertanyakannya Status keaktifan dan kegagalan Santri ini dapat mempengaruhi akibat dan tidaknya salah satu sumber menyebutkan bahwa kalau andaikan santri ini berangkat dari Pondok nanti pengurus atau yang dibebani tanggung jaab itu atas keberangkattanya ke pantai selatn. Tetapi kalau dia statusnya legal dan berangkat dari rumah atau dengan kata lain pulang ke rumah kemudian pergi ke Pantai Selatan dengan status tersebut kemudian mengalami sesuatu yang tidak diinginkan, maka yang menjadi tanggung jawab bukanlah pengurus pondok tetapi orang tuanya lah, dengan *dalih* “kenapa diperbolehkan atas kepergiannya”. Melihat hal yang terjadi sebelumnya ini, maka dapat dikatakan bahwa dampak ini sangat sulit untuk di obati dengan melihat atau mengaca korban sebelumnya. Pengiasannya dalam hal ini diibaratkan kalau nyawanya masih di atas piring itu masih dapat disembuhkan, tetapi kalau seperti hal-hal yang sebelumnya sudah terjadi dan juga dengan kata lain merenggut nyawa itu diibaratkan sebagai nyawanya sudah berada di bawah pirng. Oleh sebab itu jika sudah terkena dampak/akibat atau efek melakukan bepergian ke Pantai Selatan dengan tujuan berwisata, maka dampak atau akibat yang didapatnya merupakan suatu hal yang hal yang tidak diinginkan.

Akibat atau dampak tersebut merupakan hal atau suatu yang sangat dihindari oleh segenap *dzurriyah* dewan pengasuh pondok. Dikarenakan akibat yang andai saja tertimpa padanya, kemuadi hal-hal yang tidak dinginkan muncul maka suit disembuhkan atau diobati. Denagn dampak tersebut maka menjadi sntri juga harus memathi larangan atau praturan pondok psantrn, agar nantinya terhindar darihal-hal yang tidak dingimkan dan juga merupakan kewajiban santri untuk mematuhi peraturan, larangan atau dawuh para *Masyayikh*.

PPRU 1

Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 adalah salah satu intuisi islami yang berbasis salafiyah yang dirintis oleh KH. Yahya Syabrowi pada bertepatan pada tahun 1949 M. Pesantren ini terletak di desa yang mempunyai julukan desa santri (Ganjaran), kecamatan Gondanglegi, kabupaten Malang, awalnya hanya mendidik 10 murid (*Profil Lembaga PP Raudlatul Ulum 1 Ganjaran*, n.d.). Namun, Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 terus berkembang serta jua memiliki dinamika total santri setiap tahunnya. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 1 terkenal dengan pendidikan agama yang kuat dan disiplin yang ketat. Banyak alumni yang sukses dalam berbagai bidang, menunjukkan bahwa pendidikan yang diberikan di sana sangat berharga dan bermanfaat. Salah satu rujukan mengatakan “siapa yang menyangka jika pondok pesantren yang dirintis oleh KH Yahya Syabrowi ini memiliki koneksi histori yang bersifat inheren dengan Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948 (Pratama, 2022).

Dari hasil beberapa wawancara dapat difahami bahwasanya larangan ini bukan ada sejak berdirinya pondok PPRU 1, tetapi larangan ini ada ketika estafet kepemimpinan pondok pesantren pada kepengasuhan ke dua yakni ketika kepengasuhan KH. Khozin Yahya (salah satu putra dari pendiri PPRU 1). Larangan ini juga diperkuat oleh *dawuh* Almukarrom KH. Mujtaba Bukhori (adik dari Nyai sepuh yaitu NY Hj. Mammunah Bukhori yang juga merupakan istri dari pada pendiri PPRU 1). Beliau *dawuh* larangan ini ketika salah satu santri PPRU 1 wafat yang habis berwisata ke pantai selatan yang mana wafatnya selang berapa bulan dari Pantai selatan, dan wafat di PPRU 1. Dengan adanya santri yang wafat yang dilata belakangi dampak jika pergi berwisata ke pantai selatan ini, sebenarnya dapat menjadi acuan bagi santri terhadap larangan ini.

Dari beberapa sumber wawancara, larangan ini bersifat tidak tertulis. Dan dalam hal ini juga ada kaitannya dengan perjanjian dengan penguasa pantai selatan yang ta tertulis. Di salah satu narasumber yang mana juga merupakan salah satu dewan pengasuh di PP Raudlatul Ulum II yang berlokasi di Putukrejo Gondanglegi juga menyebutkan “*larangan itu juga tidak hanya disana saja mas, di pondok sini juga sebenarnya dilarang, hal tersebut disampaikan langsung oleh Ibu Nyai Hajjah Zainab (istri pendiri PPRU II Putukrejo)*”. Dengan artian, bahwasannya larangan ini juga ada di PP Raudlatul Ulum II Putukrejo.

Larangan ini jika dilihat dari metode atau *Manhaj* dalam pengambilan hukumnya adalah seperti halnya kaidah *La Taqrobuz zina /qurbuz zina*. Maka dari hal tersebut dapat diartikan jangankan melakukan mjanagan untuk mencoba atau melakukannya terhadap hal tersebut. Dikarenakan dengan melakukan hal tersebut menjadi awal terjadinya atau terkena akibat aau dapak hal-hal yang tidak diinginkan.

Analisis Etnografi

Etnografi adalah salah satu genre penelitian yang menekankan makna sosiologi melalui beberapa observasi lapangan tertutup dari fenomena sosiokultural (Darmanita & Yusri, 2020). Metode penelitian ini diaplikasikan dalam ilmu antropologi yang dikenal sebagai etnografi. Metode ini berfungsi sebagai jendela yang memungkinkan pemahaman yang lebih mengakar tentang masyarakat dan budaya. Para antropolog melakukan etnografi untuk menyelami kehidupan suatu kelompok manusia dengan melihat aktivitas, bahasa, kepercayaan, ritual, dan gaya hidup mereka.

Etnografi melibatkan interaksi langsung dengan peserta, bukan hanya pengamatan. Para antropolog dapat memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual dan komprehensif tentang masyarakat dan budaya yang bersangkutan karena mereka hidup bersama komunitas mereka, berpartisipasi dalam aktivitas mereka, dan menjalin hubungan yang kuat dengan mereka. Etnografi bukanlah satu-satunya bidang yang termasuk dalam penyelidikan yang bersifat kualitatif. Ada juga berbagai pendekatan, seperti analisis wacana, etnometodologi, studi kasus, fenomenologi, dll. Salah satu tanggung jawab peneliti dalam penelitian ini adalah memilih metode penelitian yang paling sesuai dengan subjek penelitian (Arivan Mahendra1 et al., 2016). Etnografi melibatkan peneliti secara penuh dengan mengeksplorasi budaya masyarakat, dan membutuhkan pemaparan data yang mendalam.

Hasil penelitian ini dengan menggunakan pendekatan etnografi dapat menemukan hasil yang memadai dalam memahami larangan ini. Peneliti dapat mengungkapkan makna dan signifikansi larangan bagi elemen pesantren yang menjalankannya dengan melakukan observasi langsung dan wawancara mendalam dengan narasumber. Penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya memahami konteks sosial, agama, dan budaya untuk memahami larangan. Peneliti juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang alasan di balik larangan ini. Selain itu, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana larangan tersebut memengaruhi interaksi sosial kalangan santri dan wali santri tersebut dengan menggunakan pendekatan etnografi. Langkah atau apa yang didapat oleh peneliti merupakan ciri yang menjadi pembeda dengan pendekatan lain yang dimiliki oleh pendekatan etnografi, yaitu dengan seperti menggunakan tiga jenis pengumpulan data: wawancara, observasi yang menuntun partisipan aktif, dan dokumentasi. Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan tiga jenis data: kutipan, deskripsi, dan kutipan dari dokumen, dan produknya adalah deskripsi atau cerita (Arivan Mahendra1 et al., 2024).

Dalam konteks keagamaan merupakan salah satu sebuah kewajiban santri dalam mematuhi peraturan pesantren, hal tersebut masuk dalam triologi santri (Shalihah & Tohet,

2020). Dari triologi santri tersebut diterangkan bahwa selain santri wajib menaati peraturan pesantren dan melakukan kewajiban-kewajibannya, santri juga wajib menjahui dan tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh pihak pesantren. Dalam larangan ini juga sesuai dengan kaidah “نَزَعَ الْمَفَا سِيدَ مُقَدَّمٍ عَلَى الْجَلْبِ الْمَصَالِحِ” yang memiliki arti “Mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan”. Dari kaidah diatas dapat diimplemantasikan dan menjadi acuan terhadap opini atau anggapan tentang pergi ke pantai selatan dengan anggapan “*jika pergi ke pantai selatan berangkat dari rumah, tidak ada masalah dan tidak timbul dhoror (bahaya). Meski dengan tujuan wisata*”. Maka dengan adanya kaidah tersebut dapat diartikan bukan ada dampak atau tidaknya, tetapi menjahui hal yang tidak diinginkan oleh dewan pengasuh dan mengaca terhadap kejadian yang sudah terjadi atau dampaknya sudah dapat dipahami bersama maka menjahui bahaya tersebut lebih utama dari pada menuruti kemauan (berwisata) atau dengan tujuan yang lain meski dengan anggapan atau opini yang ada.

Ada dampak atau tidaknya jika pergi ke pantai selatan merupakan hal yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Oleh sebab itu yang harus menjadi acuan oleh santri yang masih bersetatus aktif adalah bukan terkena dampak atau tidak, tetapi seberapa kepatuhan mereka terhadap peraturan pesantren atau *dawuh* keluarga *dhalem*. Acuan atau persepsi tersebut sebenarnya yang harus ditanamkan di hati para santri yang mana masih bersetatus santri aktif dengan kata lain masih menimba ilmu di pesantren dengan tanpa memegang anggapan yang ada (*jika berangkat dari rumah tidak ada dhorornya (bahaya)*). Pada hakitnya seorang santri harus mematuhi segala aturan atau norma yang ada di pesantren yang ditempati dikarenakan hal yang terdapat atau sumber adalah suatu norma yang harus dianut (Firmansyah et al., 2024)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa larangan ini bersifat tidak tertulis dan mengikat untuk santri yang status kesantriannya yang masih aktif dan atas status legal (izin pulang) atau keilegalannya. Hal yang juga perlu diperhatikan Kembali adalah tujuan dari keperannya ke pantai selatan tersebut atas latar belakang apa, jika dilatar belakang hanya untuk berwisata, maka masuk dalam *khitob* (katagori santri yang melanggar). Sebaliknya jika santri tersebut dilatar belakang atas alasan berwisata, seperti membantu atau orang tua membuka lapak atau toko (*tholabul halal*) untuk dipesisir pantai, maka tidak termasuk dalam *khitob* larangan ini. Hal ini disebabkan ada dampak yang sangat diprihatinkan oleh segenap keluarga dewan pengasuh yang berakibat sulit atau sukar untuk diobati. Oleh sebab

itu dapat disimpulkan bahwa jika santri yang bersifat aktif dan tujuan kerpgiannya adalah untuk berwisata maka termasuk dalam *khitob* (orang yang dikenai hukum) larnagn ini. Kemudian jika ditinjau dari status ke legalan atau ilegalya maka perpatok pada tanggung jawabnya atas kepergiannya.

Oleh sebab itu sebaiknya pihak pengurus pondok pesantren untuk mempertegas lagi atas larangan lagi, agar nantinya dapat dipahami kembali larangan ini. Baik dari segi latar belakangnya atau status kesantrianya. Hal tersebutlah yang menjadi acuan *kekhitobannya* laranagan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Arivan Mahendra^{1, 2}, M. W. I., Nurfajriani, W. V., ³, Sirodj⁴, R. A., & Muhammad Win Afgani⁵. (2024). Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(November), 14–25.
- Arivan Mahendra¹, Nurfajriani, W. V., ³, Sirodj⁴, R. A., & Afgani⁵, M. W. (2016). Menggunakan Metode Etnografi dalam Penelitian Sosial. *Dimensi*, 9(2), 87–92.
- bidin A. (2017). Опыт аудита обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации по разделу «Эпидемиологическая безопасность» No Title. In *Вестник Росздравнадзора* (Vol. 4, Issue 1).
- Darmanita, S. Z., & Yusri, M. (2020). Pengoperasian Penelitian Naratif dan Etnografi; Pengertian, Prinsip-Prinsip, Prosedur, Analisis, Interpretasi, dan Pelaporan Temuan. *As-Shaff: Jurnal Manajemen Dan Dakwah*, 1(1), 24–34. <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/asjmd/article/view/75>
- Endraswara, S. (2013). Folklor nusantara: hakikat, bentuk dan fungsi. *Folklor Nusantara: Hakikat, Bentuk Dan Fungsi*, 1–298. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-suardi-mhum/folklor-nusantaradamicetak.pdf>
- Findayani, A., Utama, N. J., & Anwar, K. (2020). Kearifan Lokal Dan Mitigasi Bencana Masyarakat Pantai Selatan Kabupaten Cilacap. *Journal of Indonesian History*, 9(1), 28–37.
- Firmansyah, SA, R., & Munir. (2024). The Urgency of Social Ethics in Santri Tradition at Muhammadiyah's Pesantren. *Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education*, 5(1), 153–170. <https://doi.org/10.31538/tijie.v5i1.991>
- Huda, M. N., & Yani, M. T. (2015). Pelanggaran Santri Terhadap Peraturan Tata Tertib Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji Lamongan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 740–753. <http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=328566>
- Husna, M., Qodri, S., Mataram, U., & Masbagik, K. (2024). Makna Simbol dalam Tradisi

Ritual Nunas Nede di Desa Kesik , Lombok Timur : Kajian Interpretatif Simbolik. *Jurnal Bastrindo*, 5, 47–61.

Isnawi, & Yulianty, I. (2024). the Myth of the Jin Kingdom in Alas Purwo Banyuwangi Indonesia in. *Jurnal of Social and Aconomics*, 6(1), 127–136.

Kadir, A. (2012). Sistem Pembinaan Pondok Pesantren. *Shautut Tarbiyah*, 01(02), 76–99.

Palar, N., Janis, V. A., Agama, I., & Negeri, K. (1966). *KONSTRUKSI SOSIAL BERGER DAN LUCKMANN DALAM CERITA MENARA BABEL KEJADIAN 11 : 1-9*. 1–9.

Pratama, R. A. (2022). *Mengenal Ponpes Raudlatul Ulum 1 Ganjaran, Berdiri 2 Kali Gegara Agresi Belanda*. Kamis, 07 Apr 2022 12:21 WIB. <https://jatimnow.com/baca-43691-mengenal-ponpes-raudlatul-ulum-1-ganjaran-berdiri-2-kali-gegara-agresi-belanda>

profil Lembaga PP Raudlatul Ulum 1 Ganjaran. (n.d.). PPRU1NET. <https://www.ppru1.net/p/profile.html>

Rifa'i, A. B. (2024). *Realitas Media Dan Konstruksi Sosial Media Massa*. 3(1), 29–42. <https://doi.org/10.54801/jisscdiksi.v3i01.259>

Rifqi Fauzi, Mia Nurislamiah, H. F. M. (2023). Komunikasi Interpersonal Kiayi dalam Meningkatkan Sikap Religiusitas Santri Melalui Tradisi Sowan Di Pondok Pesantren Khas Kempek Putri Asrama Al-Nashir Al-Manshur. *Communicative: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(July), 1–23.

Shalihah, H., & Tohet, M. (2020). Implementasi Trilogi Santri Dalam Menumbuhkan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Di Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. *Inspiratif Pendidikan*, 9(2), 53. <https://doi.org/10.24252/ip.v9i2.14620>

Sudianto, Maleh, K. (2025). Ngitus Bali Sebagai Kontrol Sosial Di Desa Murutuwu:Kajian Sosiologis-Teologis terhadap Kearifan lokal Dayak Ma'anyanKristen Indonesia. *Jurnal Teologi Pabelum*, 4(Februari), 134–149.

Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*.